

SALINAN LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 172 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

KRITERIA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DAN/ATAU KELALAIAN BESERTA  
BOBOT TANGGUNGJAWAB

No.	Jenis Perbuatan	Bobot Tanggungjawab
1.	Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama.	Kerugian Daerah ditanggung secara renteng dan ditetapkan bobot berdasarkan keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan masing-masing.
2.	Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor dan/atau barang inventaris milik Daerah untuk kepentingan kedinasan, oleh unit lain/pegawai dalam satu lingkup Perangkat Daerah.	Kerugian Daerah ditanggung secara renteng antara pengguna Barang Milik Daerah dan pemakai Barang Milik Daerah tersebut.
3.	Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor dan/atau barang inventaris milik Daerah diluar kepentingan kedinasan	Kerugian Daerah ditanggung pemakai Barang Milik Daerah tersebut.
4.	Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor dan/atau barang inventaris milik Daerah untuk kepentingan kedinasan atau diluar kedinasan, oleh unit lain/pegawai diluar Perangkat Daerah sebagai pengguna Barang Milik Daerah.	Kerugian Daerah ditanggung pemakai Barang Milik Daerah tersebut.
5.	Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian barang inventaris milik Daerah oleh Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah sebagai pengguna Barang Milik Daerah/lembaga non-pemerintah/perorangan tanpa perikatan.	Kerugian Daerah ditanggung Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah sebagai pengguna Barang Milik Daerah/lembaga non-pemerintah/perorangan tersebut.

PERSENTASE PENGgantian KERUGIAN DAERAH BERDASARKAN SKTJM

No.	Jenis Perbuatan	Besaran Persentase Ganti Rugi
1.	Kerugian Daerah yang timbul dalam hal melaksanakan tugas kedinasan selain akibat perbuatan melanggar hukum dan kelalaian.	1% s/d 30% dari nilai Kerugian Daerah
2.	Kerugian Daerah yang timbul diluar pelaksanaan kedinasan selain akibat perbuatan melanggar hukum dan kelalaian.	31% s/d 70% dari nilai Kerugian Daerah
3.	Kerugian Daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum dan kelalaian	71% s/d 100% dari nilai Kerugian Daerah

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 172 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA, KEPUTUSAN PEMBEBANAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN ATAS PROSES KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI, PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH, SURAT KETERANGAN LUNAS, PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN DAN DAFTAR KERUGIAN DAERAH

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....1)  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.....2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan .....3)

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam jangka waktu .....4) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....5)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- a. ....6);
- b. ....;
- c. ....;

Apabila dalam jangka waktu .....4) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Probolinggo, .....7).

*materai cukup*  
(.....8))

Menyetujui,  
Kepala .....9).

.....  
NIP.....

Saksi-saksi : 1. ....10)  
2. ....

#### Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 6) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 8) Diisi Nama lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM
- 9) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN .....1)

NOMOR : .....2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP

SAUDARA/I .....3)

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. Dst.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....1) TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I .....3)

KESATU : Membebani saudara/i .....3) sebesar Rp.....4)( .....*dengan huruf*.....) atas kerugian daerah yang disebabkan.....5)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i .....3) sebagaimana Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....3):  
a. ....6)  
b. ....

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal: ..... 7)

Walikota/ Kepala Badan/Kepala Dinas.....8)

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....9)
2. ....
3. ....
4. ....
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi Nama Pejabat yang Menandatangani Surat
- 9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, Walikota, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO

Nomor: .....1)

Tentang

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH

TERHADAP SAUDARA/I.....2)

Menimbang : a. ....;

b. ....;

c. dst.

Mengingat : 1. ....;

2. ....;

3. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEMBEBASAN SAUDARA/I. ....2)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp.....3) (*....dengan huruf....*) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i.....2) di lingkungan.....4).

KEDUA : Saudara/I sebagaimana diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi

KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU

KEEMPAT : .....5).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal: .....6)

Walikota Probolinggo

(.....7))

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. ....8)
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian.
- 4) Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 5) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 6) Diisi dengan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 7) Diisi Nama Pejabat yang Menandatangani Surat
- 8) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.



D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : .....1)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

TERHADAP SAUDARA/I .....2)

Menimbang

: a. ....;

b. ....;

c. dst.

Mengingat

: 1. ....;

2. ....;

3. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

TERHADAP SAUDARA/I .....2)

KESATU

: Membebani saudara/i .....2) sebesar Rp.....3) .....dengan

huruf.....) atas kerugian daerah yang disebabkan.....4)

KEDUA

: Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,

berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....2):

a. ....5)

b. ....

KETIGA

: rekening Kas Umum Daerah.....6) melalui .....7) paling

lambat .....8) (...dengan huruf...) hari sejak keputusan ini

ditetapkan.

KEEMPAT

: Apabila saudara/I sebagaimana diktum KESATU, tidak

mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas

waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan

akan diserahkan kepada.....9)

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal .....10)

Walikota Probolinggo

( .....11)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1.....12)
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 7) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 8) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 9) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- 10) Diisi dengan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 11) Diisi dengan Nama Pejabat yang Menandatangani surat keputusan.
- 12) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : .....1)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP

SAUDARA/I .....2)

Menimbang : a. ....;

b. ....;

c. Dst.

Mengingat : 1. ....;

2. ....;

3 Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

TERHADAP SAUDARA/I .....2)

KESATU : Membebani saudara/i .....2) sebesar Rp. ....3) (....dengan

huruf...) atas kerugian daerah yang disebabkan.....4)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut

daftar harta kekayaan milik Saudara/i sebagaimana diktum

kesatu:

a. ....5)

b. ....

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada .....6), paling lambat

30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal .....7)

Walikota Probolinggo

(.....8))

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....9)
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama Pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- 9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan

F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Probolinggo, .....1)

Nomor : .....2)

Lampiran : .....3)

Perihal : Surat Tagihan

Kepada Yth ..... 4)

di -

.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp....7) (.....dengan huruf.....), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....8) (.....dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kota Probolinggo melalui .....10) paling lambat tanggal .....11) sebesar Rp.....12) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Probolinggo, ..... 13)

KEPALA .....14)

(.....15))

Tembusan disampaikan kepada :

1. ....; 16)

2. ....;

3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 11) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 12) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 13) Diisi dengan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 14) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 15) Diisi Nama Pejabat yang menandatangani Surat Penagihan.
- 16) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

- b. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor : .....2) .....1)  
Lampiran : .....3)  
Perihal : Surat Tagihan

Kepada Yth ..... 4)

di -

.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (.....*dengan huruf*.....) sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kota Probolinggo melalui .....8) sebesar Rp.....9) (.....*dengan huruf*.....) sesuai dengan SKP2KS No.....7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Probolinggo, .....10)

KEPALA .....11)

(.....12)

Tembusan disampaikan kepada :

1. ....;
2. ....; 13)
3. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 10) Diisi dengan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 11) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 12) Diisi nama Pejabat yang menandatangani Surat Penagihan
- 13) Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.



G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS

No : .....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas..... 2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama : .....3)

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

.....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.....4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....5) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.....4) sebesar Rp.....6) .

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.....4) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, .....7)

Kepala.....8)

(.....9))

Salinan Surat ini disampaikan kepada :

1. ....10)
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi Dengan Nama Pejabat yang menandatangani surat keputusan
- 10) Diisi dengan Walikota/Walikota/WaliKota, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth  
Walikota Probolinggo  
di -  
tempat

Dengan Hormat  
Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....1)  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.....2) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

- 1. SKP2KS/SKP2K.
- 2. Bukti Pengurangan Tagihan.
- 3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Probolinggo, .....3)

(.....4)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 2) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 3) Diisi dengan tanggal penandatangan surat permohonan.
- 4) Diisi Nama Pihak yang Merugikan.

I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Daerah Kota Probolinggo

Tahun .....11)

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/ SKP2KS/ SKP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran/ Angsuran s/d Bulan ..... (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
.....1)	.....2)	.....3)	.....4)	.....5)	.....6)	.....7)	.....8)	.....9)	.....10)

Probolinggo, .....12)

Kepala .....13)

(.....14))

NIP. ....

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- 3) Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- 4) Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
- 8) Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
- 9) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
- 10) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- 12) Diisi dengan tanggal penandatanganan.
- 13) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 14) Diisi dengan Nama Pejabat yang menandatangani.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN